

BAB I

PENDAHULUAN

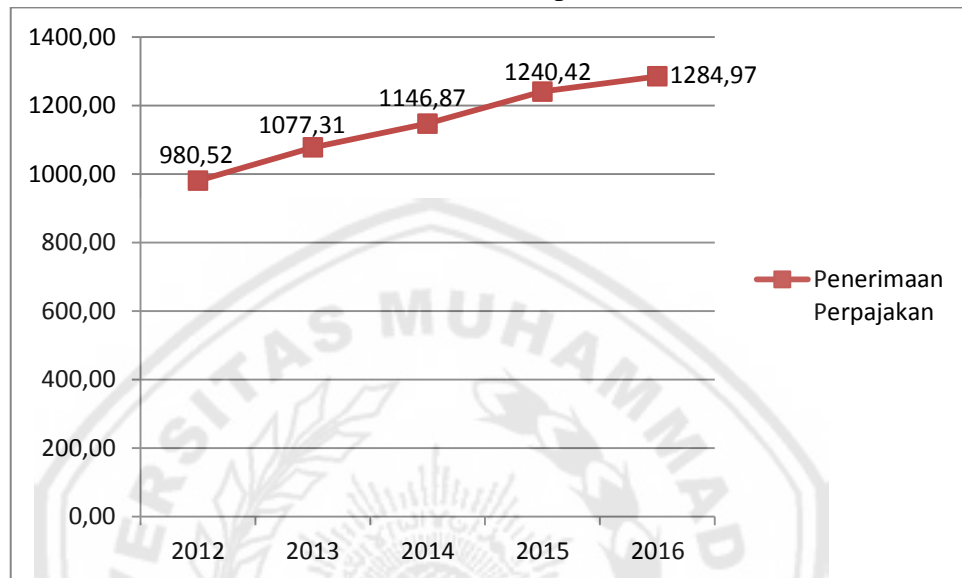
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan infrastruktur maupun jasa menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pajak merupakan salah satu sumber paling besar dari penerimaan negara. Sekitar 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Jumlah penerimaan dari

tiap tahunnya terus meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi. Target pajak yang semakin tinggi namun tidak diimbangi realisasi penerimaan yang tinggi.

Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016
(Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012-2016 (audited)

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Berdasarkan Gambar 1.1 sepanjang tahun 2012-2016 pemerintah telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Program-program tersebut antara lain adalah program intensifikasi perpajakan, program ekstensifikasi perpajakan, program *canvassing*, program intensifikasi penagihan, program penyempurnaan mekanisme keberatan banding dalam proses pengadilan pajak, *law enforcement*, dan mengefektifkan sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya membuat peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong sektor penerimaan. Baik dalam jumlah rupiah dan jumlah Wajib Pajak diharapkan terus meningkat berkat adanya peraturan dan kebijakan yang diterbitkan. Namun kembali lagi ke tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena sesungguhnya semua peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah akan berjalan efektif jika ada kesadaran sendiri dari masyarakat untuk melaksanakannya.

Kendala yang dialami pemerintah dalam rangka mendorong penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Evasion* merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum. Setiap pelakunya pasti akan dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan *Tax Avoidance* siapapun yang melakukan sama sekali tidak melanggar hukum. Masing-masing perusahaan merancang berbagai kebijakan untuk melakukan penghematan pajak, caranya adalah dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Dalam mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat diukur menggunakan pajak efektif atau *Effective Tax*. *Effective Tax* dapat dijadikan acuan oleh pemegang kepentingan dalam merencanakan kebijakan-kebijakan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak efektif adalah beban pajak, profitabilitas, total aset dan total hutang. Banyaknya jumlah aset yang dikelola dimungkinkan terjadi beban penyusutan dan pemeliharaan yang besar. Semakin berkembangnya sistem peraturan dan

kebijakan perpajakan disertai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka penulis ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax* pada perusahaan pembangunan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak.

Perusahaan pembangunan infrastruktur dipilih karena pada saat ini pemerintah sedang fokus membangun sarana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dimungkinkan perusahaan pembangunan infrastruktur membuat kebijakan-kebijakan dalam menghemat pajak yang berlawanan dalam upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pada penelitian ini digunakan Profit, Total Aset dan Total Hutang untuk menganalisa faktor-faktor *Effective Tax* yang akan diujikan pada perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2012-2016. Sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Profit, Total Aset, dan Total Hutang terhadap *Effective Tax* pada Perusahaan Infrastruktur di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Profit, Total Aset dan Total Hutang terhadap *Effective Tax* pada perusahaan infrastruktur di Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan *Effective Tax* pada perusahaan infrastruktur di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaruh Profit, Total Aset dan Total Hutang terhadap *Effective Tax* pada perusahaan infrastruktur di Indonesia
- b) Untuk mengetahui perbedaan *Effective Tax* masing-masing perusahaan infrastruktur di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a) Bagi Sektor Perusahaan

Manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan beserta resiko yang akan

ditanggng dari setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Bagi Pemerintah

Khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengurangi kesempatan perusahaan melakukan *tax advoidance*, hendaknya meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan khususnya bagi yang melaporkan rugi. Sehingga diharapkan jalur pemberian kompensasi rugi fiskal ini tidak digunakan sebagai upaya *tax advoidance* perusahaan.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dibahas pada penelitian ini tidak berkembang terlalu luas dan mengarah pada suatu penyelesaian yang benar, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan infrastruktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan infrastruktur yang tidak mengalami kerugian dan menggunakan mata uang rupiah. Dan perusahaan infrastruktur yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2012-2016.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh Profit, Total Aset dan Total Hutang terhadap *Effective Tax*.